

**ANALISIS PERBANDINGAN
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTA SE-JAWA TENGAH
SEBELUM DAN SESUDAH
KRISIS EKONOMI 2008**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika Dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

SITI KURNIATI
NIM. C2C008134

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Siti Kurniati
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008134
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS PERBANDINGAN
KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTA SE-JAWA
TENGAH SEBELUM DAN SESUDAH
KRISIS EKONOMI 2008**

Dosen Pembimbing : Drs. H. Tarmizi Achmad, MBA, Ph.D, Akt

Semarang, 7 Maret 2012

Dosen Pembimbing,

(Drs. H. Tarmizi Achmad, MBA, Ph.D, Akt)

NIP. 19550418 198603 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Siti Kurniati
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008134
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS PERBANDINGAN
KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTA SE-JAWA
TENGAH SEBELUM DAN SESUDAH
KRISIS EKONOMI 2008**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 19 Maret 2012

Tim Penguji

1. Drs. H. Tarmizi Achmad, MBA, Ph.D, Akt (.....)
2. Dr. Endang Kiswara, SE, MSi, Akt (.....)
3. Fuad, SE, MSi, Ph.D, Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya, Siti Kurniati, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Se-Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi 2008”**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 7 Maret 2012

Yang membuat pernyataan,

(Siti Kurniati)

NIM. C2C008134

ABSTRACT

This research aimed to determine whether there were differences between the financial performance of local government districts / cities in Central Java before and after the economic crisis of 2008. The instrument for analyzing the financial performance of local government in managing the local finances was by using financial ratio analysis of APBD. Furthermore, the analysis of financial ratios are used to be benchmark the level of local financial autonomy in maintain the implementation of regional autonomy, measure the effectiveness in realization of revenue, measure of local financial efficiency in spending expenditure that is spent in accordance with destining and fulfilling that was planned, the financial activity in spending of the local income and know how big component revenue contribution in the local revenue, there are local taxes and local levies.

The study sample was the regencies/ cities in Central Java. The analyzed data is Realized Report of APBD in 2005 until 2010. The analysis instrument used to determine differences between financial performance before and after the economic crisis 2008 was “The Paired Sample T Test” for normally distributed data. That if the data are not normally distributed using the test of “Wilcoxon Signed Rank Test”.

The results of research showed that the financial performances of local government district/ cities in Central Java in the form efficiency of local finance, effectiveness of local financial, regional financial activities, the contribution of local revenues (local taxes) after the economic crisis of 2008 was lower than before the economic crisis of 2008. There was no differences in the form of regional financial independence and the contribution of revenue components (local levy).

Keywords: Performance of Local Government Finances, APBD, Ratio Analysis of Local Government, The Economic Crisis of 2008.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota se-Jawa Tengah sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008. Alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Selanjutnya, analisis rasio keuangan tersebut digunakan untuk tolak ukur tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur efisiensi keuangan daerah dalam melakukan pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan, aktifitas keuangan dalam membelanjakan pendapatan daerahnya untuk alokasi belanja modal dan mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan komponen dalam pendapatan asli daerah, yakni pajak daerah dan retribusi daerah.

Sampel penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/ kota se-Jawa Tengah. Data yang dianalisis adalah Laporan Realisasi APBD pada tahun 2005 sampai dengan 2010. Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan sebelum dengan sesudah krisis ekonomi 2008 adalah *Paired Sample T Test* untuk data yang berdistribusi normal. Apabila data yang tidak terdistribusi normal menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test*.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota se-Jawa Tengah dalam bentuk efektifitas keuangan daerah, efisiensi keuangan daerah, aktifitas keuangan daerah, dan kontribusi pendapatan asli daerah (pajak daerah) sesudah krisis ekonomi 2008 lebih rendah dibanding sebelum krisis ekonomi 2008. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan daerah dalam bentuk kemandirian keuangan daerah dan kontribusi komponen pendapatan asli daerah (retribusi daerah).

Kata kunci : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, APBD, Analisis Rasio Pemerintah Daerah, Krisis Ekonomi 2008.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA SE-JAWA TENGAH SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS EKONOMI 2008”**, dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam proses penyusunan hingga skripsi ini dapat diselesaikan, penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Mohamad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Drs. H. Tarmizi Achmad, MBA, Ph.D, Akt. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan sabar memberi bimbingan dan masukan, juga doa dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Dwi Cahyo Utomo, S.E, MA, Akt dan Puji Harto, S.E, M.Si, Ph.D, Akt selaku dosen wali yang telah banyak membantu dalam kegiatan akademis.
4. Prof. Moch. Syafruddin selaku Ketua Jurusan Akuntansi Reguler 1.

5. Seluruh dosen jurusan Akuntansi khususnya dan dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis umumnya, atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan.
6. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
Tak lupa para karyawan program Ilmu Doktor atas bantuan dan informasinya.
7. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan dukungan, doa, kepercayaan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tulus kepada penulis.
8. Kakak-kakakku tersayang, Yudhi Prasetyo, Maesaroh Prasetyo, dan Lingga Efendi atas semangat dan dukungannya, serta doanya untuk penulis.
9. Terimakasih juga untuk keluarga besar Setroredjo dan Mienhad untuk bantuan dan keceriaannya.
10. Mas Deni Tri Kuncoro yang selalu memberikan dukungan dan mengajarkan kesabaran kepada penulis. Semoga kesuksesan selalu ditangan kita. Amiiin!
11. Sahabat-sahabat terbaikku, yang rame kocak, ceria, peduli. @G2K2, salam persahabatan!. Amelinda, Dyas Mewek, Diyas Diyos, Dini, Lala, Hana, Widya Anisa, Intan. Persahabatan kita tak kan lekang oleh waktu. ☺
Fatma, Tamie, Aini, Iga, Dina, Manis, Riana, Astri, Yuliana. Yang juga telah memberi banyak support kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan bimbingan: Inggy, Mia, Indra, Viva, Nanda, Tantri, Rifka.

13. Sahabat-sahabat KKN, Mas Arfian, Mbak Cheni, Fitri, Angel, Binshar, Adi, dan Mas Panji. Terimakasih buat persahabatan yang telah terjalin. Kalian banyak membantu dan tempat curhat yang baik serta menyenangkan.
14. Mbak-mbak dan mas-mas Senior angkatan 2007 dan 2006 atas masukan dan saran-sarannya tentang skripsi dan bimbingan.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terimakasih telah membantu proses penulisan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, 7 Maret 2012

Penulis,

Siti Kurniati

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“...Sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) dan ingat kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap....”

(QS. Al Insyiroh : 6-8)

“Waktu adalah solusi dari segala permasalahan, sabar adalah kuncinya,, Manusia tidak pernah salah dalam memilih, hanya kita belum siap dengan konsekuensi pilihan kita,, Bukanlah salah orang menginginkan apa yang diinginkan, hanya saja salah jika memaksakan apa yang kita inginkan,, Hope, Desire, Willingness adalah bagian dari masa depan kita...”

“My mother is my inspiration, my father is my mirror, my brother and sister are my observer, My family is everything and my friend and my soulmate are my world, I think that's was enough to remind me, who I am...”

Kupersembahkan Karya Ini untuk
Ayah, Ibu, Kakak-kakak Tercinta
Serta Keluarga Besar Setroredjo dan Mienhad,
You are my everything

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan	8

BAB II	TELAAH PUSTAKA	10
2.1	Landasan Teori	10
2.1.1	Resources-Based View Theory.....	10
2.1.2	APBD	14
2.1.3	Keuangan Daerah.....	26
2.1.3.1	Keuangan Daerah Dalam Masa Otonomi	28
2.1.4	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	29
2.1.5	Krisis Ekonomi 2008	32
2.5.1	Penyebab dan Dampak Krisis Keuangan Global	32
2.1.6	Analisis Rasio Keuangan	40
2.1.6.1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	43
2.1.6.2	Rasio Efektifitas Keuangan Daerah	45
2.1.6.3	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	46
2.1.6.4	Rasio Aktifitas Keuangan Daerah	47
2.1.6.5	Rasio Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah	47
2.2	Penelitian Terdahulu	48
2.3	Kerangka Pemikiran	52
2.4	Hipotesis	54
BAB III	METODE PENELITIAN	61
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	61
3.1.1	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	61
3.2	Penentuan Sampel	70
3.3	Jenis dan Sumber Data	70
3.4	Metode dan Pengumpulan Data	71
3.5	Metode Analisis Data	71
3.5.1	Analisis Rasio Keuangan.....	71
3.5.2	Pengujian Statistik	71

3.5.2.1 Uji Normalitas Data.....	72
3.5.2.2 Pengujian Hipotesis	73
3.5.2.3 Paired Sample T Test.....	73
3.5.2.4 Wilcoxon Signed Rank Test.....	74
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	75
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	75
4.2 Analisis Data	76
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	77
4.2.2 Uji Normalitas	80
4.2.3 Pengujian Hipotesis.....	81
4.2.3.1 Uji Beda.....	81
4.3 Intrepetasi Hasil	85
4.3.1 Hipotesis 1 Kemandirian Keuangan Daerah	86
4.3.2 Hipotesis 2 Efektifitas Keuangan Daerah	87
4.3.3 Hipotesis 3 Efisiensi Keuangan Daerah	89
4.3.4 Hipotesis 4 Aktifitas Keuangan Daerah	90
4.3.5 Hipotesis 5 Kontribusi Pajak Daerah	91
4.3.6 Hipotesis 6 Kontribusi Retribusi Daerah	92
BAB V PENUTUP.....	93
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Keterbatasan.....	95
5.3 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional.....	1
Tabel 1.2 Realisasi APBN (dalam rupiah).....	4
Tabel 2.1 Dampak Krisis Ekonomi 2008 terhadap Perkembangan Makro.....	34
Tabel 2.2 Nilai Ekspor Jawa Tengah Menurut Komoditi	39
Tabel 2.3 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	50
Tabel 3.1 Variabel dan Definisi Operasi	68
Tabel 4.1 Sampel Penelitian	76
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Rasio	77
Tabel 4.3 Uji Normalitas <i>Kolmogorof-Smirnov</i>	81
Tabel 4.4 Pengujian Hipotesis <i>Paired Sample T Test</i>	82
Tabel 4.5 Pengujian Hipotesis <i>Wilcoxon Signed Ranks</i>	83
Tabel 4.6 Kesimpulan Atas Uji Hipotesis	84

TABEL GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran Output SPSS	101

.BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Krisis keuangan global yang bermula dari krisis kredit perumahan di Amerika Serikat membawa implikasi pada memburuknya kondisi ekonomi global secara menyeluruh. Hampir di setiap negara, baik di kawasan Amerika, Eropa, maupun Asia, merasakan dampak akibat krisis keuangan global tersebut. Termasuk salah satunya adalah Indonesia. Hal ini membuat perubahan yang cukup mendadak terhadap kondisi perekonomian di Indonesia.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Nasional

2008			
Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
6,2%	6,4%	6,4%	2,8%

Sumber: Bappenas

Dampak yang ditimbulkan oleh krisis keuangan global terhadap perekonomian Indonesia mulai dirasakan pada triwulan IV tahun 2008 yang tampak pada tabel 1.1. Hal ini disebabkan penurunan ekspor dan perlambatan pertumbuhan investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Untuk menjaga kemerosotan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, konsumsi masyarakat diupayakan untuk tetap dijaga dengan menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan berbagai program pengurangan kemiskinan.

Perubahan kondisi perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi nasional yang menurun pada triwulan IV tahun 2008 diharapkan pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang secara langsung mengatur dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan untuk menerapkan kebijakan-kebijakan dan mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Buku Pegangan 2009 Penyelenggaraan dan Pembangunan Daerah menjelaskan bahwa dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga, serta adanya keterpaduan penerapan kebijakan di daerah maka fundamental perekonomian daerah akan tetap kuat dalam menghadapi krisis keuangan global. Pemberian kewenangan kepada daerah itu sendiri sebagai imbas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Azhar (2008) menjelaskan bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada awal tahun 1996 dan mencapai puncaknya pada tahun 1997 mendorong keinginan kuat dari pemerintah pusat untuk melepaskan sebagian wewenang pengelolaan keuangan kepada daerah dan diharapkan daerah dapat membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat atas dasar kemampuan keuangan sendiri. Dengan kata lain, penurunan penerimaan negara secara

simultan telah mendorong timbulnya inisiatif pemberian status otonomi kepada daerah otonom sebagaimana diatur dalam UU No.5 Tahun 1974 sebagai sebutan bagi Pemerintah Provinsi Kabupaten/ Kota di era sebelum otonomi daerah.

Otonomi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota karena daerah kabupaten/kota berhubungan langsung dengan masyarakat (Sasongko, 2009).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut tidak hanya kesiapan aparat pemerintah daerah saja, tetapi juga masyarakat untuk mendukung dengan pemanfaatan sumber-sumber daya secara optimal pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Apalagi jika dihadapkan adanya kondisi seperti krisis ekonomi.

Saat ini kemampuan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat (Purnomo, 2009). Oleh

karena itu, bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan negara karena APBN Tahun 2008 yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, antara lain tingginya harga komoditi khususnya minyak bumi dan gas alam (migas) serta krisis finansial global yang mendorong depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang US dollar. Volume APBN tahun-tahun berikutnya juga diperkirakan meningkat dibanding realisasi APBN Tahun 2008 (Bappenas, 2009).

Tabel 1.2
Realisasi APBN (dalam rupiah)

	2007	2008	2009
Pendapatan	707.806.088.304.925	981.609.433.326.137	848.763.235.195.483
Belanja	757.649.912.890.878	985.730.715.086.613	937.382.019.569.767

Sumber: LKPP Perbendaharaan

Berdasarkan tabel 1.2 realisasi APBN pada sisi pendapatan tahun 2009 menurun dari tahun 2008 sebesar 13,53%, maka setiap daerah dituntut harus dapat membiayai sendiri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya dan tidak bergantung kepada bantuan eksternal, yakni dari pemerintah pusat. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah (Purnomo, 2009).

Bappenas menjelaskan bahwa dampak krisis keuangan global terhadap perekonomian daerah antara lain dapat dilihat pada sektor perdagangan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta ketenagakerjaan. Di sektor

perdagangan, sampai dengan bulan November 2008 DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Riau, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Lampung, merupakan 10 besar Propinsi dengan nilai perdagangan luar negeri yang terbesar. Secara rata-rata nilai ekspor perbulan sampai bulan November mencapai US\$ 11,6 miliar, namun mulai mengalami sedikit penurunan pada bulan Oktober dan November 2008.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 10 propinsi yang memiliki nilai perdagangan luar negeri terbesar di Indonesia. Sehingga, pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/ kota diharapkan mampu melakukan kinerja positif dengan menetapkan kebijakan – kebijakan yang tepat sasaran dalam upaya mencegah pelemahan perekonomian Jawa Tengah lebih lanjut dan untuk mendorong struktur pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di Jawa Tengah yang lebih seimbang melalui penganggaran.

Untuk mengetahui kinerja keuangan suatu daerah maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam era otonomi daerahnya dan untuk menghadapi pelemahan pertumbuhan ekonomi daerah akibat adanya krisis ekonomi 2008. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2004).

Penggunaan analisis rasio laporan keuangan sebagai alat analisis keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial,

sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas. Padahal dari analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah dapat diketahui bagaimana kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah (Susantih, 2009).

Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dalam merealisasikan pendapatan asli daerah, mengukur efisiensi dalam melakukan pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan, mengukur sejauh mana aktifitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya untuk belanja modal, dan mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan komponen dalam pendapatan asli daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul : “ Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi 2008”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota se-Jawa Tengah sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota se-Jawa Tengah pada tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah sebelum krisis ekonomi 2008 dibanding sesudah krisis ekonomi 2008.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota se-Jawa Tengah pada tingkat efektifitas keuangan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah sebelum krisis ekonomi 2008 dibanding sesudah krisis ekonomi 2008.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/ kota se-Jawa Tengah pada tingkat efisiensi keuangan daerah dalam melakukan pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya sebelum krisis ekonomi 2008 dibanding sesudah krisis ekonomi 2008.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota se-Jawa Tengah pada tingkat aktifitas keuangan dalam membelanjakan pendapatan daerahnya untuk belanja modal sebelum krisis ekonomi 2008 dibanding sesudah krisis ekonomi 2008.
5. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota se-Jawa Tengah tingkat kontribusi

penerimaan komponen dalam PAD (pajak daerah) sebelum krisis ekonomi 2008 dibanding sesudah krisis ekonomi 2008.

6. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota se-Jawa Tengah tingkat kontribusi penerimaan komponen dalam PAD (retribusi daerah) sebelum krisis ekonomi 2008 dibanding sesudah krisis ekonomi 2008.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Tambahan pengetahuan terutama bagi penulis mengenai ilmu keuangan daerah.
2. Referensi bagi mahasiswa lain yang ingin meneliti lebih jauh tentang keuangan daerah.
3. Bahan pertimbangan dan masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan keuangan daerah bagi instansi pemerintah yang terkait.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas dan sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis dari penelitian ini.

Bab III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan Metode Penelitian yang memuat variabel penelitian, definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

Bab IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan.

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan penutup yang membahas kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 *Resource-Based View Theory*

Penggunaan sumberdaya memiliki banyak keunggulan potensial bagi perusahaan seperti pencapaian efisiensi yang lebih besar dan selanjutnya biaya yang lebih rendah, peningkatan kualitas dan kemungkinan pangsa pasar dan profitabilitas yang lebih besar (Collis, 1994). Pendekatan analitis yang disebut *Resource-Based View* (RBV) menekankan peningkatan keunggulan bersaing berasal dari sumberdaya strategis organisasi (Dierickx and Coll, 1989; Barney, 1991; Peteraf, 1993; dan Teece *et al.*, 1997). Keunggulan bersaing (*competitive advantage*) memungkinkan perusahaan memperoleh kinerja unggul pada jangka waktu tertentu (Pitts and Lei, 2003:7).

Inti dari RBV adalah bahwa perusahaan-perusahaan berbeda secara fundamental karena memiliki seperangkat sumberdaya (Grant, 2002:139; Fleisher and Bensoussan, 2003:187). Pencapaian keunggulan bersaing yang paling efektif adalah dengan menggunakan kompetensi atau kapabilitas perusahaan (Wernerfelt, 1984; Barney, 1986a; Rumelt, 1991; Evans, 1991; Peteraf, 1993; Amit and Schoemaker, 1993). Pendekatan RBV menyatakan bahwa perusahaan dapat mencapai keunggulan bersaing yang berkesinambungan dan memperoleh

keuntungan superior dengan memiliki atau mengendalikan aset-aset strategis baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Menurut pendekatan RBV, perusahaan merupakan sekumpulan sumberdaya strategis dan produktif yang unik, langka, kompleks, saling melengkapi dan sulit untuk ditiru para pesaing yang dapat dimanfaatkan sebagai elemen untuk mempertahankan strategi bersaing. Perkembangan teori dan empiris sekarang ini membuktikan bahwa perusahaan dengan kompetensi superior akan menghasilkan informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggannya dan juga lebih baik dalam membangun dan memasarkan barang atau jasa melalui aktivitas yang terkordinasi dengan baik. Lebih lanjut, kompetensi superior juga memberi perusahaan kemampuan untuk menghasilkan dan bertindak berdasarkan pengetahuan mengenai aksi dan reaksi pesaing, yang akan membantunya membangun keunggulan bersaing (Naver *and* Slater, 1990; Touminen *et al.*,1997).

Barney (1991) menyajikan struktur yang lebih konkret dan komprehensif untuk mengidentifikasi pentingnya kompetensi untuk memperoleh keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Barney (1991) mengutarakan empat indikator sehingga kompetensi yang dimiliki perusahaan dapat menjadi sumber keunggulan bersaing yang berkesinambungan, yakni: bernilai (*valuable*), merupakan kompetensi langka di antara perusahaan-perusahaan yang ada dan pesaing potensial (*rare*), tidak mudah ditiru (*inimitability*), dan tidak mudah digantikan (*non-substitutability*).

1. Bernilai (*valuable*)

Kompetensi bernilai (*valuable competencies*) adalah kompetensi yang menciptakan nilai bagi suatu perusahaan dengan mengeksploitasi peluang-peluang atau menetralsir ancaman-ancaman dalam lingkungan eksternal perusahaan. Kompetensi dapat menjadi sumber keunggulan bersaing yang berkesinambungan hanya ketika kompetensi tersebut bernilai (*valuable*). Kompetensi dikatakan bernilai ketika kompetensi tersebut menyebabkan perusahaan mampu menyusun dan mengimplementasikan strategi-strategi yang dapat meningkatkan nilai bagi pelanggan khususnya.

2. Langka (*rareness*)

Kompetensi langka adalah kompetensi yang dimiliki oleh sedikit, jika ada, pesaing saat ini atau potensial. Kompetensi perusahaan yang bernilai namun dimiliki oleh sebagian besar pesaing yang ada atau pesaing potensial tidak dapat menjadi sumber keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Sebuah perusahaan dikatakan menikmati keunggulan bersaing ketika perusahaan tersebut dapat mengimplementasikan strategi penciptaan nilai yang tidak dapat dilakukan oleh sebagian besar perusahaan lainnya. Dengan kata lain, keunggulan bersaing dihasilkan hanya ketika perusahaan mengembangkan dan mengeksploitasi kompetensi yang berbeda dari pesaingnya. Jika kompetensi yang bernilai tadi dimiliki oleh sebagian besar perusahaan, dan tiap-tiap perusahaan memiliki kemampuan untuk menggunakannya dengan cara dan teknik yang sama, dan selanjutnya mengimplementasikan strategi yang hampir

sama maka dapat dikatakan tidak ada satupun perusahaan yang memiliki keunggulan bersaing.

3. Sulit Ditiru (*inimitability*)

Kompetensi yang bernilai dan langka tersebut hanya dapat menjadi sumber keunggulan bersaing yang berkesinambungan jika perusahaan lain yang tidak memilikinya, tidak dapat memperoleh kompetensi tersebut. Dalam istilah yang dibangun oleh Lippman *and* Rumelt (1982) dan Barney (1986a; 1986b), kompetensi ini disebut sangat sulit ditiru (*imperfectly imitable*).

4. Sulit Digantikan (*Insubstitutability*)

Kompetensi yang sulit digantikan adalah kompetensi yang tidak memiliki ekuivalen strategis. Dua sumberdaya perusahaan yang bernilai (atau dua kumpulan sumberdaya perusahaan) ekuivalen secara strategis ketika tiap sumberdaya itu dapat dieksploitasi secara terpisah untuk mengimplementasikan strategi-strategi yang sama. Secara umum, nilai strategis dari kompetensi meningkatkan kesulitan untuk menggantikannya. Semakin tidak terlihat suatu kompetensi, semakin sulit bagi perusahaan untuk mencari penggantinya dan semakin besar tantangan bagi para pesaing untuk meniru strategi penciptaan nilai perusahaan.

Keunggulan bersaing sebuah perusahaan harus didasarkan pada sumberdaya khusus yang menjadi penghalang (*barriers*) aktivitas peniruan dan ancaman pengganti (*imitation and substitution*) produk atau jasa perusahaan. Meningkatnya tekanan persaingan dapat menurunkan keunggulan bersaing perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa bagi sebuah perusahaan, agar tetap

bertahan hidup (*survive*) di tengah tekanan persaingan yang semakin tajam, perusahaan harus mengambil tindakan yang dapat mempertahankan dan memperkuat kompetensinya yang unik (Reed *and* DeFillipi, 1990).

Bila dikaitkan dengan tata pemerintahan khususnya di daerah, maka keunggulan yang dimaksud adalah memiliki kompetensi dalam melakukan pengelolaan keuangan yang paling relevan dengan menghasilkan aturan/ kebijakan tertulis melalui suatu regulasi di bidang penerimaan dan regulasi di bidang pengeluaran. Melalui regulasi tersebut pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranan dalam membuka peluang memajukan daerah dengan menumbuh kembangkan serta menggali seluruh potensi yang ada di daerah dan mengendalikan aset-aset strategis daerah sebagai sumber pendapatan daerah dan mampu menetapkan belanja daerah secara wajar, efisien, dan efektif termasuk meningkatkan kinerja perangkatnya.

Selain itu diharapkan pemerintah daerah mampu mengatasi tantangan, salah satunya yakni mencegah pelemahan perekonomian yang berkelanjutan akibat krisis ekonomi dan mampu bertahan dalam kondisi ekonomi tersebut. Sehingga tetap mampu menjalankan otonomi daerah sebagai daerah yang mandiri dalam urusan daerahnya sendiri yakni penyelenggaraan pemerintah, pembangunan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.

2.1.3 APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD

merupakan struktur yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah (Kawedar, 2008).

Dengan APBD dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas, pembangunan yang akan dan yang sedang dilaksanakan. Dengan demikian peningkatan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi juga akan meningkatkan produktifitas faktor-faktor produksi. Melakukan peningkatan SDM yang dapat menerapkan teknologi tinggi dalam proses produksi dan hasil-hasil produksi semakin meningkat. Peningkatan produksi yang tidak dikonsumsi akan meningkatkan tabungan masyarakat. Akhirnya, peningkatan tabungan akan meningkatkan investasi sehingga semakin banyak jasa yang tersedia bagi masyarakat (Halim, 2007).

Pelaksanaan dan Perubahan APBD (Pasal 26-33 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003)

Halim (2007) mengungkapkan bahwa setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan/Walikota. Dalam melaksanakan APBD, Pemerintah Daerah Menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Selain itu, penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/ atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka

penyusunan prakiran. Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih pada tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Berikut ini merupakan struktur APBD, Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan atas:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat (18), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan

memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007, kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatannya terdiri atas:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2004). Berdasarkan UU. 28 Tahun 2009, jenis pajak kabupaten/ kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah, komponen lain yang juga termasuk komponen PAD, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (PP No. 66 tahun 2001 pasal 1 ayat (1) tentang Retribusi Daerah). Berdasarkan UU. 28 Tahun 2009, objek retribusi yang dipungut kabupaten/kota terdiri atas;

a. Objek Retribusi Jasa Umum

Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Seperti : Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan penguburan mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pengujian Kapal Perikanan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan lain-lain;

b. Objek Retribusi Jasa Usaha

Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, seperti : Retribusi Pemakaian Ke-

kayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Penyebrangan di Atas Air, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan lain-lain; dan

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Setiap Daerah mempunyai hak untuk memajukan daerahnya dengan menggunakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan perusahaan daerah maupun kekayaan setiap daerah yang dimiliki. Undang-Undang mengizinkan daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nantinya diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat memberikan kontribusi pembangunan. Kontribusi tersebut dapat berupa deviden yang dibayarkan kepada daerah atau juga dengan memanfaatkan kekayaan daerah seperti penyewaan tanah

dan bangunan daerah yang dapat mendatangkan tambahan bagi penerimaan daerah (Ardhini, 2011).

Jenis pendapatan yang tergolong dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini antara lain:

- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
- c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain:

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;

- f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. pendapatan denda pajak;
- i. pendapatan denda retribusi;
- j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. pendapatan dari pengembalian;
- l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- n. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 19). Menurut UU No. 33 tahun 2004 pasal 10 dan UU No.12 tahun 2008 pasal 159, tentang dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil tersebut bersumber dari pajak dan bukan pajak. Dana yang bersumber dari pajak terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak pribadi dalam negeri, dan PPh pasal 21, sedangkan dana bagi hasil yang

bersumber dari bukan pajak berasal dari: kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas alam, dan pertambangan panas bumi.

2. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 21). Menurut UU No. 33 tahun 2004, DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antara daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah

3. Dana Alokasi Khusus.

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 23). DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang

belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
- d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

(Permendagri No. 59 tahun 2007 pasal 28)

2. Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 22 ayat (1) belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan. Belanja menurut kelompok belanja:

1. Belanja Tidak Langsung:

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. bunga;
- c. subsidi;
- d. hibah;
- e. bantuan sosial;
- f. belanja bagi basil;
- g. bantuan keuangan; dan
- h. belanja tidak terduga.

2. Belanja Langsung:

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

3. Pembiayaan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 pasal 1 ayat 54, Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan bersumber dari :

a) Penerimaan pembiayaan mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 pasal 1).
2. Pencairan dana cadangan
Digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan (Permendagri No. 59 tahun 2007 pasal 64).
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
Digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/ BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
4. Penerimaan pinjaman daerah

Digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

6. Penerimaan piutang daerah

Digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

b) Pengeluaran pembiayaan mencakup:

1. Pembentukan dana cadangan
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
3. Pembayaran pokok utang
4. Pemberian pinjaman daerah

2.1.3 Keuangan Daerah

Faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah (Susantih, 2009). Halim (2007) mengungkapkan bahwa

kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Keuangan daerah secara sederhana dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan/ peraturan perundangan yang berlaku (Halim, 2007). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 5, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dari pengertian tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu :

1. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah;

2. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

Pemerintah Daerah di dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana/ modal untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut (*government expenditure*) terhadap barang-barang publik (*publik goods*) dan jasa pelayanannya (Susantih, 2009). Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

2.1.3.1 Keuangan Daerah Dalam Masa Otonomi

Lahirnya otonomi daerah telah memberikan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah. Untuk itu kebijaksanaan keuangan daerah diarahkan pada upaya penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan ini juga diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip, norma, asas dan standar akuntansi dalam penyusunan APBD agar mampu menjadi dasar bagi kegiatan pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah.

Tujuan keuangan daerah pada masa otonomi adalah menjamin tersedianya keuangan daerah guna pembiayaan pembangunan daerah, pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip, norma, asas, dan standar akuntansi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara kreatif melalui penggalan potensi. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai keuangan daerah adalah kemandirian keuangan daerah melalui upaya yang terancam, sistematis, dan berkelanjutan, efektif, dan efisien (Suprpto, 2007).

2.1.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundangundangan.

Organisasi sektor publik (Pemerintah) merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan karena masyarakat merupakan salah satu *stakeholder* organisasi sektor publik. Sehingga pemerintah tidak hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat saja, tetapi juga kepada masyarakat luas (Susantih, 2009).

Oleh karena itulah diperlukan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi (Susantih, 2009). Mardiyasmo (2002) mengungkapkan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu:

1. Memperbaiki kinerja pemerintah.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pelaksanaan otonomi daerah tentunya tidak mudah, karena menyangkut masalah kemampuan daerah itu sendiri dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan beserta pelaksanaan pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, masalah kemampuan daerah berarti menyangkut masalah bagaimana daerah dapat memperoleh dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah untuk menjalankan pemerintahannya (Susantih, 2009). Menurut Prabowo (1999) sesuai dengan konsep asas desentralisasi dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah sangat dibutuhkan dana dan sumber-sumber pembiayaan yang cukup memadai, karena kalau daerah tidak mempunyai sumber keuangan yang cukup akibatnya tergantung terus kepada pemerintah pusat.

Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah, semakin besar pula kebutuhan akan dana yang harus dihimpun oleh Pemerintah Daerah,

kebutuhan dana tersebut tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh dana yang bersumber dari pemerintah daerah sendiri (Hirawan, 1990). Dengan demikian maka perlu mengetahui apakah suatu daerah itu mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka kita harus mengetahui keadaan kemampuan keuangan daerah (Susantih, 2009).

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Susantih 2009).

1. Kemampuan struktural organisasinya.

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

2. Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah

Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.

3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

2.1.5 Krisis Ekonomi 2008

2.1.5.1 Penyebab dan Dampak Krisis Keuangan Global

Berdasarkan Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (2009) yang dikeluarkan BAPPENAS menjabarkan penyebab terjadinya krisis keuangan global 2008 dan dampak krisis keuangan global tersebut terhadap perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.

1. Penyebab Krisis Keuangan Global

Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat bermula dari krisis kredit perumahan di Amerika Serikat. Amerika Serikat pada tahun 1925 telah menetapkan undang-undang mengenai *Mortgage* (Perumahan). Peraturan tersebut berkaitan dengan sektor properti, termasuk kredit kepemilikan rumah yang memberikan kemudahan bagi para kreditur. Banyak lembaga keuangan pemberi kredit properti di Amerika Serikat menyalurkan kredit kepada masyarakat yang sebenarnya secara finansial tidak layak memperoleh kredit yaitu kepada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kredit yang mereka lakukan.

Situasi tersebut memicu terjadinya kredit macet di sektor properti (*subprime mortgage*). Kredit macet di sektor properti tersebut mengakibatkan efek domino yang mengarah pada bangkrutnya beberapa lembaga keuangan di Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan lembaga pembiayaan sektor properti umumnya meminjam dana jangka pendek dari pihak lain yang umumnya adalah lembaga keuangan. Jaminan yang diberikan perusahaan pembiayaan kredit properti adalah surat utang (*subprime mortgage securities*) yang dijual kepada lembaga-lembaga investasi dan investor di berbagai negara. Padahal, surat utang

tersebut tidak ditopang dengan jaminan debitor yang memiliki kemampuan membayar kredit perumahan yang baik.

Dengan adanya tunggakan kredit properti, perusahaan pembiayaan tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada lembaga-lembaga keuangan, baik bank investasi maupun *aset management*. Hal tersebut mempengaruhi likuiditas pasar modal maupun sistem perbankan. Kondisi tersebut mengarah kepada terkurasnya likuiditas lembaga-lembaga keuangan karena tidak memiliki dana aktiva untuk membayar kewajiban yang ada. Ketidakmampuan membayar kewajiban tersebut membuat lembaga keuangan yang memberikan pinjaman terancam kebangkrutan.

Kondisi yang dihadapi lembaga-lembaga keuangan besar di Amerika Serikat mempengaruhi likuiditas lembaga keuangan yang lain, baik yang berada di Amerika Serikat maupun di luar Amerika Serikat terutama lembaga yang menginvestasikan uangnya melalui instrumen lembaga keuangan besar di Amerika Serikat. Disinilah krisis keuangan global bermula.

2. Dampak terhadap Perkembangan Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2008 mencapai 6,1 persen. Dampak yang ditimbulkan oleh krisis keuangan global terhadap perekonomian Indonesia mulai dirasakan pada triwulan IV tahun 2008, dimana pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2008 menurun sebesar minus 3,6 persen dibandingkan triwulan III-2008, dan meningkat 5,2 persen dibandingkan dengan triwulan IV-2007 yang berarti lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan-triwulan sebelumnya pada tahun 2008 yaitu 6,2 persen di triwulan I, 6,4 persen pada triwulan II, 6,4 persen pada triwulan III. Penurunan ekspor dan perlambatan

pertumbuhan investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus terjadi pada tahun 2009.

Pertumbuhan ekonomi tersebut saling mempengaruhi dengan pertumbuhan faktor-faktor ekonomi sebagai berikut:

Tabel 2.1
Dampak Krisis Ekonomi 2008 terhadap Perkembangan
Ekonomi Makro

Dampak	2007	2008	2009
Sisi Keuangan Negara		realisasi APBN Tahun 2008 banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, antara lain tingginya harga komoditi khususnya minyak bumi dan gas alam (migas) serta krisis finansial global yang mendorong depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang US dollar.	Volume APBN Tahun 2009 diperkirakan meningkat dibanding realisasi APBN Tahun 2008.
Sisi Moneter	Rp9.419,-/USD pada bulan Desember 2007	Rp9.118,-/USD pada bulan Juni 2008 didorong oleh peningkatan penerimaan ekspor dan pemasukan modal swasta Nilai tukar kemudian kembali melemah dan mencapai	sedikit menguat menjadi Rp10.700,- /USD pada minggu ketiga April 2009

		puncaknya menjadi Rp12.151,- /USD pada bulan November 2008	
Sektor Keuangan	meskipun kondisi perekonomian dunia mengalami guncangan yang sangat berat, namun ketahanan sektor perbankan Indonesia masih cukup kuat. Di tengah-tengah krisis ekonomi dunia pertumbuhan kredit perbankan nasional meningkat pesat.	Sampai dengan Desember 2008 kredit tumbuh mencapai 30,7 persen. Selain melalui sistem konvensional, pembiayaan melalui perbankan syariah juga terus meningkat. Pembiayaan melalui perbankan syariah tumbuh sebesar 36,5 persen.	

Sumber: Bappenas

3. Dampak terhadap Pertumbuhan Sektor Riil

Dalam bidang infrastruktur, khususnya sektor transportasi, berkurangnya anggaran pemerintah akibat krisis keuangan global mengakibatkan semakin tidak terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi. Di sisi lain, terjadi kenaikan biaya transportasi akibat terdepresiasi nilai rupiah dan inflasi. Hal ini telah mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat kinerja infrastruktur transportasi dalam mendukung kegiatan ekonomi, antara lain penurunan tingkat keselamatan, kelancaran distribusi, dan terhambatnya hubungan dari satu daerah ke daerah yang lain. Keadaan tersebut menyebabkan biaya angkut dan biaya produksi yang lebih mahal dari yang seharusnya, sehingga berdampak pada meningkatnya harga jual barang dan jasa.

Sementara itu, terhambatnya transportasi antarwilayah akan mengurangi peluang terjadinya perdagangan antarwilayah yang dapat mengurangi perbedaan harga antar wilayah. Hambatan transportasi juga menurunkan mobilitas tenaga kerja sehingga meningkatkan konsentrasi keahlian dan keterampilan pada beberapa lokasi wilayah tertentu saja. krisis global berdampak pada ketersediaan anggaran pemerintah untuk pembangunan perumahan dan pemukiman. Penurunan tingkat permintaan dan komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia mengakibatkan pengerutan sektor riil yang berlanjut kepada kenaikan PHK dan penurunan daya beli masyarakat.

Hal ini dapat berakibat pada menurunnya *demand* terhadap perumahan dan permukiman. Dampak terhadap sektor pertanian relatif kecil bila dibandingkan dengan sektor lain. Dampak krisis kepada sektor pertanian lebih disebabkan dari sisi permintaan (*demand side*), dan bukan karena faktor keuangan finansial. Saat krisis ekonomi terjadi, justru sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor yang diandalkan untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Dampak krisis ekonomi juga belum terasa signifikan di sektor perikanan dan kelautan.

Di sektor kehutanan, krisis ekonomi dapat menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap sumber penghidupan masyarakat yang tinggal di hutan dan sekitarnya. Inflasi dan meningkatnya biaya hidup serta input pertanian, misalnya, akan menimbulkan kemunduran bagi banyak rumah tangga. Walaupun demikian, sumber penghidupan mungkin membaik karena perkembangan-perkembangan seperti meningkatnya keuntungan dari tanaman ekspor. Runtuhnya hukum dan ketertiban selama krisis, seperti yang terjadi di Indonesia, juga merupakan faktor

pendukung yang bersifat negatif maupun positif. Tutupan hutan alam pun dapat mendatangkan keuntungan atau sebaliknya menjadi rusak akibat dampak krisis ekonomi.

Sementara itu, dalam bidang lingkungan hidup, krisis ekonomi akan berdampak terhadap kebutuhan untuk menata lingkungan, menurunkan karbondioksida di atmosfer dan berinvestasi untuk energi ramah lingkungan, yang berakibat pada meningkatnya ongkos energi sebesar 20 persen dan meningkatnya harga barang-barang. Dalam bidang perdagangan dan industri, pelemahan permintaan dunia sebagai dampak krisis ekonomi global akan berdampak terhadap penurunan volume perdagangan dunia.

Akibatnya, tingkat persaingan produk ekspor di pasar global akan semakin runcing dan harga komoditas pada tahun 2009 diperkirakan akan lebih rendah dari tahun 2008. Pada tahun 2009 diperkirakan pertumbuhan industri masih melemah karena memang permintaan yang belum pulih akibat krisis global baik dari pasar domestik maupun dari pasar internasional. Tantangan lain adalah adanya kemungkinan serbuan produk impor dari negara lain, akibat dari menurunnya permintaan produk di beberapa pasar utama ekspor dunia, yang kemudian dialihkan ke pasar Indonesia.

Neraca Perdagangan Indonesia juga mengalami penurunan karena peningkatan ekspor lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan impor, sebagai efek dari melemahnya permintaan global. Dampak krisis keuangan global juga akan berpengaruh langsung terhadap sektor industri antara lain: meningkatnya harga pembelian bahan baku, meningkatnya persaingan antar

produk ekspor, terganggunya pasar dalam negeri, dan terganggunya rencana perluasan dan investasi.

4. Dampak krisis Keuangan Global terhadap Perekonomian Daerah

Dampak krisis keuangan global terhadap perekonomian daerah antara lain dapat dilihat pada sektor perdagangan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta ketenagakerjaan. Di sektor perdagangan, sampai dengan bulan November 2008 DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Riau, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Lampung, merupakan 10 besar Propinsi dengan nilai perdagangan luar negeri yang terbesar. Secara rata-rata nilai ekspor perbulan sampai bulan November mencapai US\$ 11,6 miliar, namun mulai mengalami sedikit penurunan pada bulan Oktober dan November 2008.

Krisis ekonomi yang sedang terjadi mungkin tidak memberikan pengaruh langsung bagi UMKM dan koperasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterkaitan antara UMKM dan koperasi dengan perekonomian global yang masih sangat terbatas. Investasi asing yang masuk masih terfokus pada usaha skala besar. UMKM dan koperasi juga tidak memiliki hutang luar negeri. Faktor lain yang menjadikan UMKM bisa bertahan dalam masa krisis yaitu UMKM relatif tidak terpengaruh keterbatasan pembiayaan/kredit yang disalurkan oleh perbankan. Namun demikian, dampak dari krisis ekonomi global saat ini tetap dapat dirasakan oleh sebagian UMKM, terutama yang berorientasi pada pasar ekspor. Sementara itu, di sektor ketenagakerjaan, PHK akan berdampak langsung kepada peningkatan angka pengangguran.

Tabel 2.2**Nilai Ekspor Jawa Tengah Menurut Komoditi Tahun 2006 - 2010 (US \$) 1)***Export Value of Jawa Tengah by Commodity 2006 - 2010 (US \$)*

Tahun <i>Year</i>	Non Minyak dan Gas <i>Non Oil and Gas</i>	Minyak dan Gas <i>Oil and Gas</i>	Jumlah <i>Total</i>
2006	2.899.272.529	215.474.601	3.114.747.130
2007	3.122.461.807	347.187.824	3.469.649.631
2008	3.160.330.900	111.872.600	3.272.203.500
2009	2.885.296.714	181.162.818	3.066.459.532
2010	3.674.042.428	194.549.112	3.868.591.540

Sumber : BPS

Source : *BPS-Statistics Indonesia*

Berdasarkan tabel 2.2, nilai ekspor Jawa Tengah pada tahun 2008 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2007. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap penerimaan daerah terkait industri-industri orientasi ekspor yang mengalami penurunan permintaan di luar negeri. Sementara itu, imbas terkait industri-industri orientasi ekspor tersebut berdampak pada peningkatan angka pengangguran karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Jawa Tengah yang awal tahun 2009 mencatat 3.441 buruh di-PHK. Selain itu, juga terdapat 4.860 tenaga kerja yang dirumahkan akibat krisis yang terjadi selama 2008. Para tenaga kerja yang di-PHK dan dirumahkan tersebut berasal dari 31 perusahaan yang tersebar di 12 kabupaten dan

kota di Jawa Tengah. Kedua belas kabupaten/ kota itu meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Boyolali, Tegal, Cilacap, Sukoharjo, Klaten, Pekalongan, Jepara, Kendal, dan Demak (*inilah.com*, 1/1/2009).

Menurut Purwantini dan Purwantiningsih (2008) terdapat kesamaan dan perbedaan antara krisis ekonomi tahun 1998 dengan krisis global tahun 2008. Kesamaan dari kedua krisis tersebut antara lain (1) kedua krisis tersebut merupakan konsekuensi adanya ekonomi global, karena adanya saling ketergantungan ekonomi dan finansial antar negara; (2) dampak krisis akan mengakibatkan turunnya nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing; dan (3) dampak krisis akan berimbas kepada sektor ekonomi yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

Perbedaan antara krisis ekonomi dan krisis global antara lain : (1) krisis ekonomi tahun 1998 bersifat multidimensional yaitu krisis ekonomi, politik, sosial, ideologi, pertahanan dan keamanan sedang krisis global lebih cenderung pada krisis finansial dan ekonomi; (2) krisis ekonomi berawal dari krisis mata uang Bath-Thailand sedangkan krisis global berawal dari macetnya Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Sub Prime di Amerika Serikat; (3) krisis ekonomi tahun 1998 berimbas pada tindakan anarkisme masyarakat sedangkan krisis global tidak; serta (4) krisis ekonomi menyebabkan rakyat menuntut pergantian kepemimpinan, sedangkan krisis global tidak.

2.1.6 Analisis Rasio Keuangan Daerah

Halim (2007) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja penda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya (Suprpto, 2007).

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2002). Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolok ukur dalam:

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.

- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan (Halim, 2002) adalah :

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).

DPRD adalah badan yang memberikan otorisasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola laporan keuangan daerah.

2. Pihak Eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.

Badan eksekutif merupakan badan penyelenggara pemerintahan yang menerima otorisasi pengelolaan keuangan daerah dari DPRD, seperti Gubernur, Bupati, Walikota, serta pimpinan unit Pemerintah Daerah lainnya.

3. Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban Gubernur sebagai wakil pemerintah (Pasal 2 PP No. 108/2000).

4. Masyarakat,

Masyarakat disini adalah kelompok yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang menerima produk dan jasa dari pemerintah daerah.

5. Investor, kreditor dan donatur, sebagai pihak-pihak yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah. Turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi.

2.1.6.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Mahmudi, 2007). Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaiknya (Halim, 2002).

$$\text{Rasio Kemandirian } i = \frac{PAD\ i}{\text{Total Pendapatan Daerah } i}$$

Ket : i = Seluruh kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Tengah.

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Ada empat macam pola yang memperkenalkan “hubungan situasional” yang dapat digunakan dalam pe-

laksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah” (Halim, 2002) antara lain:

- a. Apabila tingkat kemandirian 0%-25% pola hubungan *instruktif*, berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- b. Apabila tingkat kemandirian 25%-50% pola hubungan *konsultatif*, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- c. Apabila tingkat kemandirian 50%-75% pola hubungan *partisipatif*, peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d. Apabila tingkat kemandirian 75%-100% pola hubungan *delegatif*, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Terkait dengan pendapatan asli daerah sebagai salah satu komponen pendapatan daerah, seorang pakar dari World Bank berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20%, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri (Riduansyah, 2003).

2.1.6.2 Rasio Efektifitas Keuangan Daerah

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Halim, 2002). Alokasi anggaran dikatakan efektif jika menyeimbangkan berbagai permintaan dalam pemerintahan, baik dari organisasi sektor dan sektor publik dan strategi pencapaian tujuan (visi) yang telah ditetapkan (Halim 2007).

$$\text{Rasio Efektifitas } i = \frac{\text{Realisasi PAD } i}{\text{Target Penerimaan PAD } i}$$

Ket : i = Seluruh kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 kriteria nilai efektivitas keuangan daerah dapat dikatakan sangat efektif jika nilai rasionya di atas 100 persen, efektif jika nilai rasionya 90-100 persen, cukup efektif jika nilai rasionya 80-90 persen, kurang efektif jika nilai rasionya 60-80 persen dan tidak efektif jika nilai rasionya kurang dari 60 persen.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah (Halim, 2007).

2.1.6.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan (Hamzah, 2006).

Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan. Pengelolaan belanja daerah yang baik sesungguhnya dapat memainkan peranan yang penting dalam pengentasan kemiskinan dan penciptaan kesejahteraan masyarakat di daerah (Analisis APBD Bagi DPRD, 2009). Rasio efisiensi tersebut diukur dengan (Hamzah, 2006):

$$\text{Rasio Efisiensi } i = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran } i}{\text{Realisasi Penerimaan } i}$$

Ket : i = Seluruh kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Tengah.

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Budiarso, 2007). Apabila kinerja keuangan diatas 100% ke atas dapat dikatakan tidak efisien, 90% - 100% adalah kurang efisien, 80% - 90% adalah cukup efisien, 60% - 80% adalah efisien dan dibawah dari 60% adalah sangat efisien.

2.1.6.4 Aktifitas Keuangan Daerah

Aktifitas keuangan daerah adalah bagaimana pemda memperoleh dan membelanjakan pendapatannya (Susantih, 2009). Salah satu analisis aktifitas keuangan daerah adalah dengan rasio keserasian belanja modal.

Rasio Keserasian Belanja Modal

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja modal secara optimal. Selanjutnya pada penelitian ini secara sederhana, rasio keserasian belanja modal tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut (Marizka, 2009):

$$\text{Rasio Belanja Modal } i = \frac{\text{Belanja Modal } i}{\text{Total Belanja Daerah } i}$$

Ket : i = Seluruh kabupaten kota di Propinsi Jawa Tengah.

Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan belanja pelayanan publik (belanja modal) maka dana yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin besar (Susantih, 2009).

2.1.6.5 Rasio Kontribusi

Rasio kontribusi ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan komponen dalam PAD terhadap pendapatan asli daerah setiap tahunnya dalam persentase, dapat dihitung dari realisasi jumlah pajak daerah/ retribusi daerah dibandingkan dengan jumlah PAD pada tahun anggaran yang sama. Selanjutnya pada penelitian ini secara sederhana, rasio kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen terbesar PAD adalah sebagai berikut (Sari, 2010):

$$\text{Rasio Kontribusi Pajak Daerah } i = \frac{\text{Jumlah Pajak Daerah } i}{\text{Jumlah PAD (tahun yang sama) } i}$$

$$\text{Rasio Kontribusi Retribusi Daerah } i = \frac{\text{Jumlah Retribusi Daerah } i}{\text{Jumlah PAD (tahun yang sama) } i}$$

Ket : i = Seluruh kabupaten kota di Propinsi Jawa Tengah.

Semakin besar komponen pajak daerah dan retribusi daerah dalam pendapatan asli daerah, berarti semakin baik pula kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi daerahnya (Sari, 2010). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi pula (Suprpto, 2006). Hasil rasio keuangan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk tolak ukur dalam mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

MHD Karya Satya Azhar (2008) melakukan analisis dengan menguji hipotesis kinerja keuangan desentralisasi fiskal, upaya fiskal kemandirian pembiayaan, efisiensi penggunaan anggaran pada kabupaten/kota Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumut. Dengan menggunakan uji beda *Paired Sample T Test*. Menunjukkan bahwasanya terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan setelah otonomi diberlakukan. Namun perbedaan yang timbul lebih banyak ke arah negatif dengan kata lain terjadi penurunan kinerja keuangan secara umum jika dibandingkan pada era sebelum otonomi.

Tri Suprpto (2006) melakukan penelitian tingkat kemandirian daerah Kabupaten Sleman untuk setiap tahun anggarannya mengalami peningkatan, dikare-

nakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup besar. Rasio efektivitas pendapatan daerah Kabupaten Sleman cenderung efektif, karena kontribusi PAD yang diberikan terhadap target yang ingin dicapai lebih dari 100%. Rasio Efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun semakin efisien karena biaya yang dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah semakin proposional dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan.

Heny Susantih dan Yulia Saftiana (2009) melakukan penelitian yakni perbandingan indikator kinerja keuangan pemerintah provinsi se-Sumatera bagian Selatan. Dengan menggunakan uji beda *Kolmogorov Smirnov*. Hasil analisis kinerja keuangan daerah terhadap lima propinsi se-Sumatera Bagian Selatan dari tahun 2004-2007 dengan indikator kemandirian, efektifitas dan aktivitas keuangan daerah dapat diketahui bahwa tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kelima propinsi se-Sumatera Bagian Selatan mempunyai kebijakan keuangan yang hampir serupa antar satu dengan yang lain.

Ardi Hamzah (2006) menyatakan bahwa pengujian secara langsung antara kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan rasio kemandirian, dan rasio efisiensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran menunjukkan terdapat pengaruh secara positif, sedangkan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan terdapat pengaruh secara negatif.

Bambang Sardjito (2009) melakukan analisis studi kasus pada perusahaan perbankan yang listed di BEJ dengan menguji hipotesis kinerja keuangan *leverage multiplier, assets utilization, interest expense ratio, cost of fund, efficiency of salaries and revenue, efficiency of salaries and employees, efficiency of asset and employee*. Menggunakan uji *Paired Sample T Test*. Menunjukkan bahwasannya tidak adanya perbedaan antara *leverage multiplier, efficiency of salaries and revenue* sebelum dan sesudah krisis moneter 1998. Terdapat perbedaan antara *assets utilization, interest expense ratio, cost of fund, efficiency of salaries and employees, efficiency of asset and employees* sebelum dan sesudah krisis moneter 1998.

Tabel 2.3
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul dan Variabel	Analisis	Hasil
MHD Karya Satya Azhar (2008)	“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah” desentralisasi fiskal, upaya fiskal kemandirian pembiayaan, efisisensi penggunaan anggaran	Uji Beda <i>Paired Sample T Test</i>	Terdapat perbedaan kinerja keuangan pada kabupaten/kota Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumut sebelum dan setelah otonomi diberlakukan
Tri Suprpto (2006)	“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Masa	Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah	Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sleman dari tahun 2000-2004 telah berusaha mandiri dalam menge-

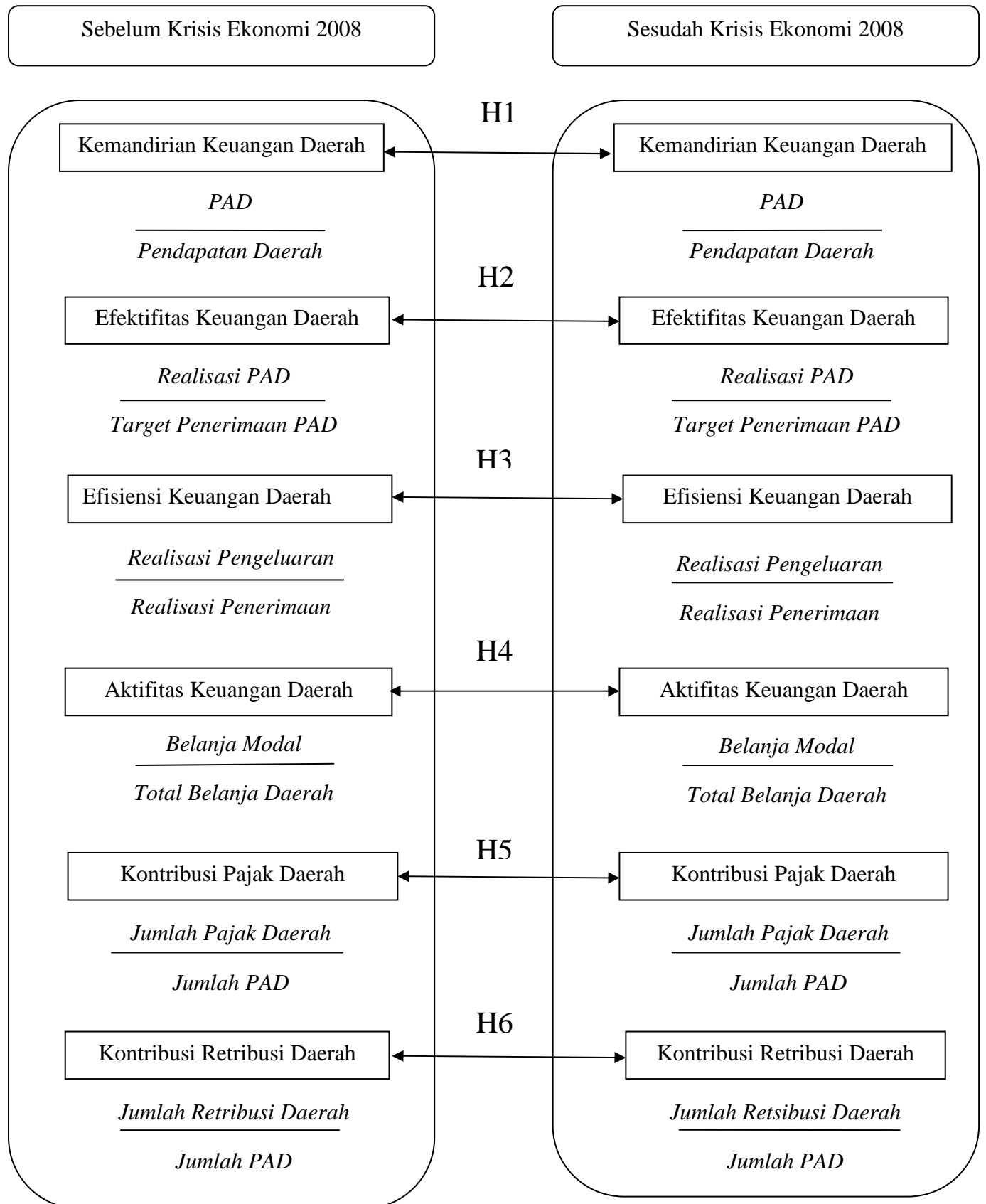
	<p>Otonomi Daerah Tahun 2000 – 2004”</p> <p>Kinerja Keuangan: tingkat kemandirian daerah, efektivitas pendapatan daerah, Efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah</p>		<p>lola keuangan daerahnya dan berusaha untuk dapat berotonomi sesuai dengan sasaran yang hendak dituju dalam otonomi daerah, pemungutan Pendapatan Asli Daerah cenderung efektif, dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun semakin efisien</p>
<p>Heny Susantih dan Yulia Saftiana (2009)</p>	<p>“Perbandingan indikator kinerja keuangan Pemerintah propinsi se-sumatera bagian selatan)”</p> <p>Kinerja keuangan: kemandirian, efektifitas, dan aktivitas keuangan daerah</p>	<p>Uji Beda <i>Kolmogorov Smirnov</i></p>	<p>Tidak ada perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintah daerah pada lima Propinsi se-Sumatera Bagian Selatan untuk periode penelitian tahun 2004-2007. Hal ini menunjukkan bahwa ke-lima propinsi se-Sumatera Bagian Selatan mempunyai kebijakan keuangan yang hampir serupa antar satu dengan yang lain.</p>
<p>Ardi Hamzah (2006)</p>	<p>“Analisis kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur”</p> <p>Kinerja Keuangan: rasio kemandirian, efektifitas, efisiensi</p>	<p>Analisis Jalur</p>	<p>Rasio kemandirian¹, Rasio kemandirian², dan Rasio efisiensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektifitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</p>
<p>Bambang Sardjito (2009)</p>	<p>“Analisis Efisiensi Perusahaan Perbankan Sebelum dan Sesudah Krisis Moneter 1998”</p> <p>Kinerja Keuangan: leverage multiplier,</p>	<p>Uji Beda <i>Paired Sample T Test</i></p>	<p>Tidak adanya perbedaan antara leverage multiplier, efficiency of salaries and revenue sebelum dan sesudah krisis moneter 1998. Terdapat perbedaan antara assets utilization, interest expense ratio, cost of fund, efficiency of salaries and</p>

	assets utilization, interest expense ratio, cost of fund, efficiency of salaries and revenue, efficiency of salaries and employees, efficiency of asset and employees		employees, efficiency of asset and employees sebelum dan sesudah krisis moneter 1998.
--	---	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis indikator kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah yang terdiri dari indikator kemandirian keuangan daerah, efektifitas keuangan daerah, efisiensi keuangan daerah, aktivitas keuangan daerah dalam mengalokasikan belanja modal, kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah. Krisis Ekonomi 2008 merupakan *cut off* sehingga dalam penelitian membandingkan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota se-Jawa Tengah sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008.

Dari uraian tersebut maka dapat dibuat kerangka pikir guna mempermudah pemahaman perbandingan kinerja keuangan Pemerintah daerah kabupaten/ kota se-Jawa Tengah sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008. Sebagaimana tampak pada gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.4 Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/ kota se-Jawa Tengah sebelum krisis ekonomi 2008 dibanding sesudah krisis ekonomi 2008. Hipotesis merupakan hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua variabel atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio aktifitas keuangan daerah (keserasian belanja modal), rasio kontribusi pajak daerah, dan rasio kontribusi retribusi daerah.

Indonesia pernah dilanda krisis moneter 1998 yang dampaknya berpengaruh terhadap berbagai sektor terutama sektor ekonomi. Namun pada saat itu sistem pemerintahan belum memberlakukan otonomi daerah, sehingga ketika daerah mengalami kesulitan keuangan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menopang keuangan daerah. Namun, semenjak otonomi daerah diberlakukan efektif 1 Januari 2001 dan ketika Indonesia dihadapkan pada krisis ekonomi pada tahun 2008, pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi daerahnya sendiri guna membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di daerahnya tersebut.

Interpretasi/ analisis terhadap laporan realisasi APBD sangat bermanfaat untuk mengetahui keadaan dan perubahan kinerja keuangan pemerintah daerah

yang dihadapkan pada krisis ekonomi 2008. Dengan melakukan analisis realisasi APBD dapat diketahui kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota.

Kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Mahmudi, 2007). Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaiknya (Halim, 2002). Menurut Sidik (2002) pemerintah daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan potensi keuangan lokal, khususnya PAD.

Hasil penelitian Susilo dan Adi (2007) menemukan adanya peningkatan PAD pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Namun, temuan data BPS (Jawa Tengah dalam angka 2010) bahwasanya pemerintah daerah berekspektasi turunnya PAD pada tahun 2009 sebesar 4,38%. Karena pertumbuhan ekonomi daerah berdampak pula terhadap perkembangan basis penerimaan daerah yang ada. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2009 atas dasar harga konstan lebih lambat dari tahun 2008 yaitu 4,71% (2008=5,46%) yang diakibatkan adanya pengaruh krisis ekonomi 2008. Berdasarkan ulasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Tingkat kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008 berbeda.

Krisis ekonomi 2008 mengakibatkan kinerja keuangan pemerintah daerah tingkat kemandirian keuangan daerah sesudah krisis ekonomi 2008 lebih rendah dibanding sebelum krisis ekonomi 2008.

Efektifitas keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2002). Semakin tinggi rasio efektifitas ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen PAD (Dwirandra, 2006).

Berdasarkan data BPS Jateng, Pajak hotel dan pariwisata yang merupakan salah satu penerimaan terbesar dari pajak daerah, dibandingkan dengan keadaan tahun 2008 terjadi penurunan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara sebesar minus 1,92%. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kabupaten/ kota di Jawa Tengah yang bersumber dari Kanwil Dirjen Pajak Jawa Bagian Tengah I juga mengalami penurunan. Pada tahun 2008 sebesar 1,022 triliun rupiah, pada tahun 2009 sebesar 987 miliar rupiah, dan 870,8 miliar rupiah pada tahun 2010. Selain itu, penerimaan PAD terbesar lainnya bersumber dari retribusi daerah. Realisasi retribusi daerah kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2010 dan 2009 juga mengalami penurunan dari tahun 2008. 1,072 triliun rupiah pada tahun 2008, 947 miliar rupiah pada tahun 2009, dan 870,4 miliar rupiah pada tahun 2010 (Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kota se-Jateng). Berdasarkan ulasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Tingkat efektifitas keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008 berbeda.

Krisis ekonomi 2008 mengakibatkan kinerja keuangan pemerintah daerah tingkat efektifitas keuangan daerah sesudah krisis ekonomi 2008 lebih rendah dibanding sebelum krisis ekonomi 2008.

Efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Dalam hal ini mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Jika nilai efisiensi tinggi, maka jumlah belanja diindikasikan sangat tinggi (Hamzah, 2006).

Guna meningkatkan efektifitas dalam kebijakan fiskal dengan membuat rencana pengeluaran yang disesuaikan dengan ketersediaan pendapatan (Fasano, 2002). Temuan data BPS (Jawa Tengah Dalam angka 2010), tahun 2009 pemerintah daerah Jawa Tengah mengurangi target pendapatan sebesar 5,51%. Selain itu, berdasarkan buku Pegangan 2009 Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan daerah yang dikeluarkan Bappenas, krisis ekonomi 2008 menyebabkan biaya angkut dan biaya produksi lebih mahal dari yang seharusnya sehingga berdampak pada meningkatnya harga jual barang dan jasa. Berdasarkan ulasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Tingkat efisiensi keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008 berbeda.

Krisis ekonomi 2008 mengakibatkan kinerja keuangan pemerintah daerah tingkat efisiensi keuangan daerah sesudah krisis ekonomi 2008 lebih rendah dibanding sebelum krisis ekonomi 2008.

Aktifitas Keuangan daerah menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah. Dalam hal ini memprioritaskan alokasi dananya pada belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan belanja pelayanan publik (belanja modal) maka dana yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin besar (Susantih, 2009).

Ardhini (2011) mengungkapkan bahwa pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah. Peningkatan Pemerintah Daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan.

Data BPS Jateng yang bersumber dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah mengenai proyek dan pembangunan desa/kelurahan di Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah tidak dilakukan pada tahun 2008 dan 2009. Dimulai kembali pada tahun 2010 dengan rata-rata biaya proyek pembangunan sebesar 466 juta rupiah. Tidak sebesar pada tahun 2007 dengan rata-rata biaya proyek pembangunan sebesar 2,6 miliar rupiah. Berdasarkan ulasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Tingkat aktifitas keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008 berbeda.

Krisis ekonomi 2008 mengakibatkan kinerja keuangan pemerintah daerah tingkat aktifitas keuangan daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja modal sesudah krisis ekonomi 2008 lebih rendah dibanding sebelum krisis ekonomi 2008.

Rasio kontribusi dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan komponen dalam PAD terhadap pendapatan asli daerah setiap tahunnya dalam persentase, yang dihitung dari realisasi jumlah pajak dan retribusi daerah (Sari, 2010). Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi pula (Suprpto, 2006). Semakin besar kontribusi komponen pendapatan asli daerah, semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah dalam menggali sumber potensinya (Sari, 2010).

Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada (Sidik, 2002). Hasil penelitian Susilo dan Adi (2007) menemukan adanya peningkatan PAD pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Peningkatan PAD ini disebabkan karena meningkatnya penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini mengindikasikan adanya upaya yang keras dari daerah untuk mengoptimalkan potensi lokal yang sangat mengandalkan kontribusi langsung masyarakat untuk membayar. Namun demikian, pemerintah daerah harus mencegah eksploitasi yang berlebihan terhadap upaya peningkatan PAD ini agar masyarakat tidak semakin terbebani (Adi, 2007).

Buku Pegangan 2009 Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan daerah menjelaskan bahwa krisis ekonomi 2008 berdampak pada industri-industri yang beorientasi pasar ekspor. Penurunan tingkat permintaan dan komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia mengakibatkan pengerutan sektor riil yang berlanjut kepada kenaikan PHK dan penurunan daya beli masyarakat. Berdasarkan data BPS Jateng banyaknya industri besar dan kecil pada kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami penurunan. Pada tahun 2007 berjumlah 5168 industri, tahun 2008 berjumlah 4678 industri, dan berjumlah 4213 industri pada tahun 2009. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang melibatkan masyarakat dan industri-industri tersebut. Berdasarkan ulasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Kontribusi penerimaan komponen dalam PAD dalam bentuk pajak daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008 berbeda.

H₆: Kontribusi penerimaan komponen dalam PAD dalam bentuk Retribusi Daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008 berbeda.

Krisis ekonomi 2008 mengakibatkan kinerja keuangan pemerintah daerah bentuk kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah sebagai komponen PAD sesudah krisis ekonomi 2008 lebih rendah dibanding sebelum krisis ekonomi 2008.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Susantih, 2009). Menurut Halim (2001) analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.

Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD (Azhar, 2008). Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan pendapatan daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Sehingga, ketergantungan kepada pemerintah pusat memiliki proporsi yang lebih

kecil, dan PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi penyelenggaraan pemerintah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan. Rumusan rasio kemandirian daerah (Halim, 2002) yaitu :

$$\text{Rasio Kemandirian } i = \frac{\text{PAD } i}{\text{Total Pendapatan Daerah } i}$$

Ket : i = Seluruh kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Tengah.

PAD merupakan total penjumlahan dari komponen-komponen. Di antaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah (penjualan barang milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan bermotor, cicilan rumah dinas, penerimaan atas kekayaan daerah, sumbangan pihak ketiga, penerimaan jasa giro (Permendagri No.13 tahun 2006).

Langkah-langkah untuk melakukan perhitungan kemandirian keuangan daerah adalah:

1. Membuat tabel perkembangan APBD dari tahun 2005 hingga 2010, lalu membagi untuk tahun 2005-2007 (periode sebelum krisis ekonomi 2008) dan untuk tahun 2008-2010 (periode sesudah krisis ekonomi 2008),
2. Mengidentifikasi PAD dan total pendapatan daerah untuk masing-masing tahun,
3. Membandingkan antara PAD dengan total penerimaan (sesuai formulasi rasio kemandirian keuangan daerah),

4. Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut dengan berpatokan pada:
 - a. Apabila tingkat kemandirian 0%-25%, berarti kemampuan keuangan daerah tersebut rendah sekali. Maka, daerah tersebut sangat bergantung kepada pemerintah pusat (pola hubungan *instruktif*);
 - b. Apabila tingkat kemandirian 25%-50%, berarti kemampuan keuangan daerah tersebut rendah. Namun, campur tangan pemerintah pusat dalam hal keuangan sudah mulai berkurang. Sehingga, daerah tersebut dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah (pola hubungan *konsultatif*).
 - c. Apabila tingkat kemandirian 50%-75%, berarti kemampuan keuangan daerah tersebut sedang. Dengan demikian daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah (pola hubungan *partisipatif*).
 - d. Apabila tingkat kemandirian 75%-100% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut tinggi. Sehingga, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah (pola hubungan *delegatif*).

(Halim, 2002).

2. Efektifitas Keuangan Daerah

Analisis efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan. Rumusan rasio efektifitas (Halim, 2002) yaitu :

$$\text{Rasio Efektifitas } i = \frac{\text{Realisasi PAD } i}{\text{Target Penerimaan PAD } i}$$

Ket : i = Seluruh kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 kriteria nilai efektivitas keuangan daerah dapat dikatakan sangat efektif jika nilai rasionya di atas 100 persen, efektif jika nilai rasionya 90-100 persen, cukup efektif jika nilai rasionya 80-90 persen, kurang efektif jika nilai rasionya 60-80 persen dan tidak efektif jika nilai rasionya kurang dari 60 persen.

Langkah – langkah untuk melakukan perhitungan Rasio Efektifitas Keuangan Daerah:

1. Membuat tabel target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2005 hingga 2010, lalu membagi untuk tahun 2005-2007 (periode sebelum krisis ekonomi 2008) dan untuk tahun 2008-2010 (periode sesudah krisis ekonomi 2008),
2. Mengidentifikasi target penerimaan PAD dan realisasi penerimaan PAD untuk masing -masing tahun anggaran,
3. Membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan untuk masing-masing tahun anggaran (sesuai formulasi rasio efektifitas keuangan daerah),
4. Menentukan tingkat efektifitas.

Untuk menentukan tingkat efektifitas tidaknya pungutan PAD digunakan asumsi sebagai berikut:

- a. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi PAD) semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target PAD) maka dapat dikatakan pemungutan PAD semakin efektif.
- b. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi PAD) semakin kecil terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target PAD) maka dapat dikatakan pemungutan PAD kurang efektif. Apabila rasio efektivitas mencapai 1 (100%) berarti daerah tersebut mampu menjalankan tugasnya dengan efektif (Halim 2002).

3. Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah.

Rasio efisiensi (Hamzah, 2006) diukur dengan:

$$\text{Rasio Efisiensi } i = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran } i}{\text{Realisasi Penerimaan } i}$$

Ket : i = Seluruh kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Tengah.

Langkah-langkah untuk melakukan perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah adalah:

- a. Membuat tabel realisasi penerimaan (pendapatan daerah) dan pengeluaran (belanja daerah) dari tahun 2005 hingga 2010, lalu membagi untuk tahun 2005-2007 (periode sebelum krisis ekonomi 2008) dan untuk tahun 2008-2010 (periode sesudah krisis ekonomi 2008),
- b. Mengidentifikasi realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran untuk masing-masing tahun anggaran,

- c. Membandingkan antara kedua realisasi tersebut yang ditetapkan untuk masing-masing tahun anggaran (sesuai formulasi rasio efisiensi penggunaan anggaran),
- d. Menentukan tingkat efisiensi.

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Budiarto, 2007). Apabila kinerja keuangan diatas 100% ke atas dapat dikatakan tidak efisien, 90% - 100% adalah kurang efisien, 80% - 90% adalah cukup efisien, 60% - 80% adalah efisien dan dibawah dari 60% adalah sangat efisien.

4. Aktifitas Keuangan Daerah

Aktifitas keuangan daerah adalah bagaimana pemerintah daerah memperoleh dan membelanjakan pendapatan daerahnya.

Analisis Aktifitas (Rasio Keserasian Belanja)

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemda memprioritaskan alokasi dananya pada belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan belanja pelayanan publik (belanja modal) maka dana yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin besar (Susantih, 2009). Selanjutnya pada penelitian ini secara sederhana, rasio keserasian belanja modal tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut (Marizka, 2009):

$$\text{Rasio Belanja Modal } i = \frac{\text{Belanja Modal } i}{\text{Total Belanja Daerah } i}$$

Ket : i = Seluruh kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Tengah.

Langkah-langkah untuk melakukan perhitungan Rasio Keserasian Belanja Modal adalah:

- a. Membuat tabel realisasi belanja modal dan realisasi belanja daerah dari tahun 2005 hingga 2010, lalu membagi untuk tahun 2005-2007 (periode sebelum krisis ekonomi 2008) dan untuk tahun 2008-2010 (periode sesudah krisis ekonomi 2008),
 - b. Mengidentifikasi realisasi belanja modal dan realisasi total belanja daerah untuk masing -masing tahun anggaran,
 - c. Membandingkan antara realisasi belanja modal dan realisasi total belanja daerah yang telah ditetapkan untuk masing-masing tahun anggaran (sesuai formulasi rasio efektifitas keuangan daerah),
5. Rasio Kontribusi

Rasio kontribusi ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan komponen dalam PAD terhadap pendapatan asli daerah setiap tahunnya dalam persentase, dapat dihitung dari realisasi jumlah pajak/ retribusi daerah dibandingkan dengan jumlah PAD pada tahun anggaran yang sama.

Rumusan rasio kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah (Sari, 2010):

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kontribusi} &= \frac{\text{Jumlah Pajak Daerah } i}{\text{Jumlah PAD (tahun yang sama)}} \\ \text{Rasio Kontribusi} &= \frac{\text{Jumlah Retribusi Daerah } i}{\text{Jumlah PAD (tahun yang sama)} } \end{aligned}$$

Ket : i = Seluruh kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Tengah.

Semakin besar kontribusi komponen pendapatan asli daerah, semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah dalam menggali sumber potensinya .

Langkah-langkah untuk melakukan perhitungan Rasio Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

- a. Membuat tabel realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2005 hingga 2010, lalu membagi untuk tahun 2005-2007 (periode sebelum krisis ekonomi 2008) dan untuk tahun 2008-2010 (periode sesudah krisis ekonomi 2008),
- d. Mengidentifikasi realisasi pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing - masing tahun anggaran,
- e. Membandingkan antara realisasi pajak daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah, serta membandingkan realisasi retribusi daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah.

Tabel 3.1

Variabel dan Definisi Operasi

No	Variabel	Indikator	Referensi	Konsep variabel	Formula	Skala Pengukuran
1.	Kinerja Keuangan	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Halim (2002)	Kemampuan pendapatan daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi penyelenggaraan pemerintah	$\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$	Skala Rasio

2.		Rasio Efektifitas Keuangan Daerah	Halim (2002)	kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$	Skala Rasio
3		Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	Hamzah (2006)	menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah	$\frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}}$	Skala Rasio
4		Rasio Aktifitas Keuangan Daerah	Susantih (2009) Marizka (2009)	menggambarkan bagaimana pemda memprioritaskan alokasi dananya pada belanja modal secara optimal	$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$	Skala Rasio
5		Rasio Kontribusi Pajak Daerah	Sari (2010)	mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah sebagai komponen dalam PAD terhadap pendapatan asli daerah	$\frac{\text{Jumlah Pajak Daerah}}{\text{Jumlah PAD}}$	Skala Rasio
6		Rasio Kontribusi Retribusi Daerah	Sari (2010)	mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan retribusi daerah sebagai komponen dalam PAD terhadap pendapatan asli daerah	$\frac{\text{Jumlah Retribusi Daerah}}{\text{Jumlah PAD}}$	Skala Rasio

3.2. Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/ kota se-Jawa Tengah yang terdiri 35 kabupaten/kota (6 kota dan 29 kabupaten). Penulis dalam penelitian mengambil seluruh populasi (metode sensus) dikarenakan tersedianya seluruh data. Sehingga sampel data yang digunakan adalah pemerintah daerah kabupaten/ kota se-Jawa Tengah yang terdiri 35 kabupaten/ kota (6 kota dan 29 kabupaten).

Data tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah kabupaten/ kota sebagai dasar perhitungan kinerja keuangan untuk periode sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008 berasal dari Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Daerah setiap tahun yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Data tersebut juga diperoleh dari Laporan Keuangan Daerah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Periode Realisasi APBD yang menjadi pengamatan penelitian ini adalah periode sebelum krisis ekonomi 2008 (tahun 2005-2007) dan sesudah krisis ekonomi 2008 (tahun 2008-2010) dengan jumlah data penelitian sebanyak 210 daerah. Dimana jumlah tersebut dengan rumus:

$N = \text{jumlah daerah} \times \text{periode penelitian}$

$N = 35 \times 6$

$N = 210 \text{ daerah}$

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD seluruh kabupaten dan kota se-

Jawa Tengah, yang diperoleh dari website resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten dan Kota (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah) Kabupaten/ Kota. Data yang digunakan dalam penelitian juga merupakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah.

3.4. Metode dan Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari dokumen yang sudah ada. Data dalam penelitian ini berasal dari laporan realisasi APBD pemerintah kabupaten/ kota se-Jawa Tengah periode 2005 hingga 2010.

3.5. Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio-rasio tersebut dibandingkan dengan rasio keuangan sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung masing-masing rasio keuangan pemerintah daerah yang sudah ditetapkan sebagai variabel penelitian. Hasil perhitungan rasio-rasio ini selanjutnya digunakan sebagai data dalam pengujian statistik.

3.5.2 Pengujian Statistik

Pengujian statistik dilakukan dengan menguji rasio keuangan sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008, dari hasil pengujian ini diharapkan dapat

mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008.

Tahap-tahap pengujian meliputi uji normalitas data dengan menggunakan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov*. Dilanjutkan dengan pengujian hipotesis untuk masing-masing variabel penelitian dengan *Paired Samples T Test* atau pun *Wilcoxon Signed Rank Test*. Tingkat signifikansi atau nilai alfa (α) pada penelitian ini ditetapkan untuk seluruh pengujian adalah sebesar 0,05 atau (5%). Besarnya nilai alfa (α) tergantung pada keberanian pembuat keputusan yang dalam hal ini berapa besar kesalahan (yang menyebabkan resiko) yang akan ditolerir (Hendriyati, 2011). Penjelasan tahap-tahap pengujian sebagai berikut:

3.5.2.1 Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas penting dilakukan karena untuk menentukan alat uji statistik apa yang sebaiknya digunakan pengujian hipotesis. Apabila data berdistribusi normal maka digunakan test parametrik sebaliknya apabila data berdistribusi tidak normal maka lebih sesuai dipilih alat uji statistik non parametrik dalam pengujian hipotesis (Bluman, 2009).

Uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* dipilih karena lebih peka untuk mendeteksi normalitas data dibandingkan pengujian dengan menggunakan grafik (Ghozali, 2006). Hipotesis nol (H_0) dinyatakan bahwa data dari masing-masing variabel penelitian pada periode sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008 berdistribusi normal. Penentuan normal tidaknya data ditentukan dengan cara, apabila hasil signifikansinya lebih besar dari tingkat signifikansi yang sudah

ditentukan ($\geq 0,05$) maka H_0 diterima maka data tersebut terdistribusi normal. Sebaliknya apabila signifikansi uji lebih kecil dari nilai signifikansi ($< 0,05$) H_0 ditolak maka data tersebut terdistribusi tidak normal.

3.5.2.2 Pengujian Hipotesis

Hasil uji normalitas data digunakan untuk menentukan alat uji apa yang paling sesuai digunakan dalam pengujian hipotesis. Apabila data berdistribusi normal maka digunakan uji parametrik, yaitu *Paired Sample T Test*. Sementara apabila data berdistribusi tidak normal uji non parametrik *Wilcoxon's Signed Rank Test* lebih sesuai digunakan. Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah data dalam uji statistik mempunyai distribusi normal atau tidak (Bluman, 2009).

Kedua model penelitian pre-post atau sebelum-sesudah. Uji beda digunakan untuk mengevaluasi perlakuan (*treatment*) tertentu pada satu sampel yang sama pada dua periode pengamatan yang berbeda yaitu sebelum dan sesudah adanya *treatment*. *Treatment* tertentu pada penelitian ini adalah peristiwa krisis ekonomi 2008. Jika *treatment* tersebut tidak berpengaruh pada subjek, maka nilai rata-rata pengukurannya adalah sama dengan atau dianggap nol dan hipotesis nol (H_0) diterima, yang berarti hipotesis alternatifnya (H_a) ditolak. Jika *treatment* ternyata berpengaruh, nilai rata-rata pengukuran tidak sama dengan nol (H_0)nya ditolak, yang berarti hipotesis alternatifnya (H_a) diterima.

3.5.2.3 Paired Samples T Test (Uji sample berpasangan)

Paired Sample T Test atau uji T sampel berpasangan merupakan uji parametrik yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan (Ghozali, 2006). Data berasal dari dua pengukuran atau

dua periode pengamatan yang berbeda yang diambil dari subjek yang dipasangkan (Bluman, 2009), yaitu kinerja keuangan pemerintah kabupaten/ kota sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008.

Paired samples t-test berguna untuk melakukan pengujian terhadap 2 sampel yang berhubungan atau sering disebut sampel berpasangan yang berasal dari populasi yang memiliki rata-rata (*mean*) sama. Pengambilan keputusan:

Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_a diterima, yang berarti terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum krisis ekonomi 2008.

Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_a ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008.

3.5.2.4 Wilcoxon Signed Rank Test

Uji statistik non parametik yang digunakan adalah dengan *Wilcoxon Signed Rank Test*. Uji ini digunakan untuk menganalisis data berpasangan karena adanya dua perlakuan yang berbeda. Dalam hal ini *Wilcoxon Signed Rank Test* digunakan untuk mengetahui perbedaan antara kinerja sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008, dengan membandingkan masing-masing indikatornya (rasio keuangan pemerintah daerah). Menurut Ghozali (2002), uji ini memberikan bobot nilai lebih untuk setiap pasangan yang menunjukkan perbedaan besar antara dua kondisi dibandingkan dengan dua pasangan yang menunjukkan perbedaan kecil.